

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan Inflasi Provinsi Banten yang tetap dari konsisten kebijakan moneter serta sinergi inflasi antara pemerintah Provinsi Banten dengan stakeholder yang tergabung dalam tim pengendalian inflasi daerah (TPID). Upaya yang dilakukan bersama melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah telah berkontribusi dalam pengendalian inflasi di Provinsi Banten.

Pada Juli 2024 terjadi inflasi *year on year (y-on-y)* Provinsi Banten sebesar 2,30 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,72. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Cilegon sebesar 2,55 persen dengan IHK sebesar 106,41.

Inflasi *y-on-y* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,07 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,51 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,36 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,54 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,82 persen; kelompok transportasi sebesar 1,15 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,23 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,61 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,92 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,33 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,32 persen.

Tingkat deflasi *month to month (m-to-m)* Provinsi Banten bulan Juli 2024 sebesar 0,24 persen dan tingkat inflasi *year to date (y-to-d)* sebesar 1,03 persen.

Pada Agustus 2024 terjadi inflasi *year on year (y-on-y)* Provinsi Banten sebesar 2,45 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,73. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Cilegon sebesar 2,69 persen dengan IHK sebesar 106,37

Inflasi *y-on-y* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,18 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,73 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,36 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,56 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,58 persen; kelompok transportasi sebesar 1,38 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,30 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,84 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,38 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,24 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,34 persen.

Tingkat inflasi *month to month (m-to-m)* Provinsi Banten bulan Agustus 2024 sebesar 0,01 persen dan tingkat inflasi *year to date (y-to-d)* sebesar 1,04 persen.

Pada September 2024 terjadi inflasi *year on year (y-on-y)* Provinsi Banten sebesar 2,03 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,46. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Lebak sebesar 2,24 persen dengan IHK sebesar 105,97.

Inflasi *y-on-y* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks

kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,02 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,88 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,30 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,53 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,73 persen; kelompok transportasi sebesar 0,68 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,13 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,40 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,56 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,59 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,31 persen.

Tingkat deflasi month to month (m-to-m) Provinsi Banten bulan September 2024 sebesar 0,26 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 0,78 persen.

Berdasarkan hasil survei Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) pada Minggu keempat Agustus 2024, komoditas bawang putih dan gula pasir menjadi pendorong terjadinya inflasi yang memiliki kenaikan harga masing-masing sebesar 5,16% dan 1,55%. Jika dibandingkan dengan trend survey PIHPS sejak awal Juli sampai dengan akhir Agustus untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi. Sedangkan, untuk barang konsumsi non pangan pada triwulan III 2024 berpotensi inflasi karena kenaikan harga emas global, peningkatan harga kopi dunia akibat kendala panen dari produsen utama seperti Vietnam dan Brazil. Disisi lain, kenaikan harga bahan baku yang terjadi karena ketergantungan terhadap impor seperti gula pasir, bahan baku tepung terigu yakni premiks fortifikan, susu, hingga pengawet dengan nilai tukar rupiah yang masih lemah.

Pada September 2024, secara tahunan tekanan harga lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi berpotensi didorong dari sisi komponen non-pangan seiring akan kembali berlangsungnya kampanye untuk Pilkada. Selanjutnya, berdasarkan historis, kelompok yang yang patut diwaspadai yakni kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, kelompok Transportasi, dan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga. Berdasarkan rata-rata 3 tahun terakhir, komoditas yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi yaitu bensin, sewa rumah, rokok kretek filter, beras, dan daging ayam ras. Komoditas bensin kembali berpotensi menyumbang inflasi pada September 2024 seiring kenaikan tarif yang baru saja ditetapkan per 1 Agustus 2024. Rokok kretek filter kembali akan mendorong inflasi seiring dampak gradual yang masih akan berlangsung hingga akhir tahun pasca penetapan tarif CHT per 1 Januari 2024. Sedangkan, beras kembali menyumbang inflasi karena cuaca buruk yang mengganggu produksi dan distribusi, serta peningkatan permintaan di pasar domestik seiring akan berlangsungnya fenomena La Nina.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Fenomena La Nina yang berpotensi menyebabkan terganggunya panen hortikultura yang sensitif terhadap hama dan penyakit tanaman. La Nina biasanya menyebabkan curah hujan yang lebih tinggi dari biasanya di wilayah Indonesia dan dengan melibatkan interaksi kompleks antara atmosfer dan lautan. Risiko terhadap pertanian yaitu:
 1. banjir dan tanah longsor akibat curah hujan tinggi,
 2. kerusakan pada tanaman dan produksi pertanian,
 3. gangguan pada pasokan dan distribusi, dan
 4. penyakit tanaman dan hama yang menyebar
2. Ketegangan politik antara Israel dan Iran yang berlangsung berimbas pada harga

minyak mentah dan akan berdampak pada harga BBM dalam Negeri.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Keterjangkauan Harga

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten menggelar Pasar Murah di Halaman Kantor Kejati Banten. Dalam Rangka Hari Bhakti Adhyaksa 2024. bekerjasama dan di pasok langsung oleh PT. ABM pada Kamis 18 Juli 2024
2. menggelar Pasar Murah dalam rangka meramaikan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Provinsi Banten 2024 pada tanggal 24-27 Juli 2024.
3. Monitoring penyaluran pupuk subsidi ke Kota Serang 3 juli 2024
4. Penyaluran bantuan pompanisasi 9 September 2024
5. Gerakan tanam percepatan luas tambah tanam padi di kabupaten lebak bersama direktorat jendral tanaman pangan 14 September 2024

Ketersediaan Pasokan

1. Pengawasan pasokan dan harga pangan serta pengawasan keamanan pangan pada tanggal 18 Juli 2024 oleh badan pangan nasional, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dan Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang yang dilakukan di Pasar Gudang Tigaraksa Kabupaten Tangerang.
2. Operasi Pasar Murah dilakukan sebanyak 89 Kali sampai triwulan III Tahun 2024.
3. Pengecekan Stock Beras dan Pengujian Kandungan Mutu dan Kandungan Zinc (Zn) Pada Beras Bio Fortifikasi di Gudang PT ABM Pontang - Kabupaten Serang, Bersama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dan Perwakilan Kelompok Tani Pelita III Jawilan - Kabupaten Serang 30 September 2024
4. Agrobisnis banten mandiri dengan koperasi pancarga tani gemilang magelang kerjasama antar daerah (kad) pengembangan komoditas pangan dan sinergi pengendalian inflasi
5. Agrobisnis banten mandiri dengan to risk tani kerjasama antar daerah (kad) pengembangan komoditas pangan dan sinergi pengendalian inflasi

Kelancaran Distribusi

Komunikasi Efektif

1. Tindaklanjuti rapat koordinasi tim pengendalian inflasi daerah setiap minggu di selama triwulan III
2. Rapat evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2024 di wilayah provinsi banten pada tanggal 5 juli 2024
3. Capacity Building Pengendalian Inflasi Daerah 23 Agustus 2024
4. Konsinyering Sekolah lapang produk pertanian hortikultura di sawah luhur 6 Agustus 2024
5. Kunjungan kerja dan peningkatan kapasitas TPID Banten dengan BUMD pangan Banten ke kabupaten brebes mengunjungi training center Bawang dan mempelajari terkait pengendalian inflasi terutama hortikultura dan kiat pelaporan kemendagri merah 24 -27 September 2024

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. memperkuat sarana dan prasarana penyimpanan pengelolaan hasil pertanian untuk menjaga ketersediaan antara waktu dan wilayah
2. memperkuat pengawasan melalui sidak pasar dan sinergi dengan satgas pangan
3. Perlu upaya penguatan koordinasi antara TPID Provinsi Banten dengan TPID Kabupaten/Kota dalam rangka penyediaan dan pendistribusian barang komoditas yang produksinya terbatas atau berada di Provinsi Banten.
4. Perlunya Provinsi Banten merelevansikan saluran irigasi dengan data percetakan sawah dalam rangka mendukung pengendalian inflasi
5. Mengupayakan inovasi guna meminimalisir ketergantungan bahan makanan pada daerah lain, melakukan penguatan ketahanan pangan di Provinsi Banten, melakukan panganekaragaman pangan dan memantau keamanan pangan.
6. Perlunya inovasi penjualan komoditi secara online.
7. Menginisiasi kerjasama antar kabupaten/kota se-Provinsi Banten dengan memanfaatkan potensi produksi yang ada dengan melakukan pendataan ketersediaan pasokan daerah yang surplus dan defisit.
8. Perlunya sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pentingnya meningkatkan produksi pangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
Langkah ini bukan hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga mendukung ketahanan nasional;
2. Dinas PUPR agar merelevansikan saluran irigasi dengan data percetakan sawah dalam rangka mendukung pengendalian inflasi;
3. mengoptimalkan dukungan APBD dalam program pengendalian inflasi;
4. Pemerintah Provinsi Banten menggerakkan para petani melalui jaringannya untuk melakukan tanam padi dan jagung serta mendukung ketepatan waktu distribusi pupuk, obat-obatan pertanian, alsintan, dan irigasi agar produksi lebih efektif dan terus melakukan monitoring dan pengawasan terhadap distribusi komoditas pangan
5. Provinsi Banten inisiatif untuk memberikan penghargaan atau award kepada kabupaten kota sebagai apresiasi terhadap kinerja pengendalian inflasi di daerahnya
6. Terus melakukan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan
7. Untuk cetak sawah sebaiknya menggunakan smart farming digital atau pertanian pintar yang merupakan konsep manajemen bercocok tanam yang mengandalkan bantuan teknologi canggih